

TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Akhmad¹, Buyung Romadhoni², Fina Diana³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

³Fakultas Ekonomi Universitas Patria Arta

Email: akhmad.pide@unismuh.ac.id

ABSTRACT

In this era of regional autonomy, a degree of financial independence from each local government is needed in order to advance regional development. The study aims to determine the development of financial independence of the second level local government in South Sulawesi. This study uses panel data of 24 second level regions in South Sulawesi in 2015-2019. The analytical method used in this study is the analysis of financial independence ratio. The results showed that the level of financial independence of districts and cities in South Sulawesi during less than 2015 to 2019 generally increased every year. Nevertheless the level of financial independence of the Level II local governments in South Sulawesi is relatively small, only an average of 12.41 percent in 2019. Much smaller than the average level of financial independence of districts and cities nationally. So the second level regional government in South Sulawesi Province needs to explore the potential of local government revenue while still paying attention to the principle of reasonableness so as not to cause a high cost economy.

Keywords: Regional Autonomy, Financial Independence, Local Government

ABSTRAK

Dalam era otonomi daerah ini, sangat dibutuhkan tingkat kemandirian keuangan dari masing-masing pemerintah daerah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemandirian keuangan pemerintah daerah tingkat II yang ada di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data panel 24 daerah tingkat II yang ada di Sulawesi Selatan tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio kemandirian keuangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan selama kurang waktu 2015 sampai 2019 secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun demikian tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan relatif kecil hanya rata-rata sebesar 12,41 persen pada tahun 2019. Jauh lebih kecil dibanding dengan tingkat kemandirian keuangan rata-rata kabupaten dan kota secara nasional. Jadi pemerintah daerah tingkat II yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan perlu menggali potensi penerimaan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kemandirian Keuangan, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia diawali dengan berlakunya Undang-

undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah. Selanjutnya kedua undang-undang tersebut direvisi dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004. Otonomi daerah melahirkan perubahan yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi di Indonesia. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas, namun setelah otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat besar pada semua bidang kecuali, pertahanan, keuangan, moneter, peradilan, agama, dan politik luar negeri (Direktorat Otonomi Daerah, 2010).

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Hak dan kewenangan dalam mengelola diperoleh melalui pelimpahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku (Indah, 2014). Sebagai wujud dari desentralisasi, diharapkan pemerintah daerah yang dianggap paling mengetahui kebutuhan masyarakat yang ada di daerahnya, sehingga dengan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, (Suci

S.C dan A.Asmara, 2014), (Syahputra R, 2017).

Suatu daerah dikatakan dapat melaksanakan otonomi dengan baik apabila daerah tersebut memiliki kewenangan untuk dapat menggali potensi keuangan yang ada di daerahnya, mengelola serta menggunakan keuangannya sendiri dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahannya (Halim A and T. Damayanti , 2011), (Akhmad., 2019). Dengan demikian ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat relatif sangat kecil. Jadi sumber keuangan utama dalam era otonomi tentunya diharapkan dari pendapatan asli daerah (PAD) (Akhmad at al, 2012), (Kamaroellah R.A, 2017).

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh beberapa hal antara lain; (1) tingkat ketergantungan (*degree of dependency*) pemerintah daerah kepada pemerintah pusat rendah, baik dalam hal perencanaan maupun dalam penyediaan keuangan, (2) kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya (*growth from inside*), dan (3) kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat ketimpangan dan kemiskinan di daerahnya (Poque T.F. and L.G.Sgontz,

1978), (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2009).

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah tingkat II di Indonesia dalam era otonomi daerah dewasa ini adalah tingginya tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. Data kementerian keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2017 rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan kabupaten kota adalah 13,90 persen, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 15,50 persen, (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018).

Dewasa ini salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan adalah tingginya tingkat ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat disebabkan karena rendahnya penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus menunjukkan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah masih rendah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengetahui perkembangan tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Desentralisasi Fiskal

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bidang politik, dan administrasi. Kebijakan desentralisasi diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, (Saragih J.P, 2014). Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pengelolaan keuangan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip *money follow function*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004, (Akhmad, 2015). Oleh karena desentralisasi dibidang administrasi juga terkait dengan transfer tenaga manusia (aparatur sipil negara), dan tentu penggajiannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian dana alokasi umum (DAU) sebagai sumber terbesar dari penerimaan daerah, umumnya digunakan untuk belanja pegawai, jadi anggaran untuk belanja modal menjadi berkurang.

Pada dasarnya desentralisasi dapat membuat pemerintah daerah lebih peka terhadap aspirasi masyarakat dibanding dengan pemerintah pusat, (Lin, J.Y. and Z. Liu, 2000), (Alm, J., R.H. Aten, and R.

Bahl. , 2001). Pemikiran yang menjadi dasar pengelolaan keuangan secara desentralisasi lebih baik dibanding sentralisasi adalah pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat di daerahnya sehingga dapat terjadi efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya keuangan yang ada.

Beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, seperti yang dilakukan (Iimi A, 2005), dengan menerapkan metode *cross country* dengan menggunakan data tahun 1997-2001, menemukan, bahwa kebijakan desentralisasi fiskal memberi dampak positif terhadap kenaikan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya temuan (Samimi A.J at al, 2010) di Iran yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan kebijakan utama dalam desentralisasi fiskal. Transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki arti yang sangat penting, karena pengeluaran pemerintah sebagian besar dibiayai oleh transfer fiskal dari

pemerintah pusat, (Simanjuntak, 2002). Bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebelum desentralisasi, secara umum dilakukan dalam bentuk *specific grant*. Bentuk *specific grant* adalah bentuk anggaran yang kegiatannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, akibatnya pelaksanaan dilapangan tidak sedikit mengalami kendala baik administrasi maupun pelaksanaan, (Subiyantoro, H. dan S. Rifat, 2004), (Susiyati, B.H, 2007). Memasuki era desentralisasi pola transfer fiskal dilakukan dalam bentuk *block grant*, jadi pemerintah daerah memungkinkan untuk melakukan perencanaan kegiatan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, bentuk *block grant* yaitu berupa dana alokasi umum.

Pendapatan Daerah

Secara umum penerimaan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu (1) pendapatan asli daerah, (2) dana perimbangan, dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah, merupakan dana yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerahnya.

Pendapatan asli daerah dikelompokkan lagi kedalam empat kelompok yaitu; (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah guna membantu daerah dalam melaksanakan otonominya. Dana pemimbangan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu, (1) dana bagi hasil (DBH), (2) dana alokasi umum (DAU), dan (3) dana alokasi khusus (DAK)

Dalam era otonomi daerah dewasa ini, pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi (Nurhemi and G.Suryani, 2015). Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi yang ada di daerahnya, dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerahnya.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam

membayai kegiatan pemerintahannya, membangun dan melayani masyarakat, (Halim A., 2007), (Akhmad., 2019). Oleh karena itu tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan berupa perbandingan antara penerimaan daerah yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dibanding dengan total penerimaan pemerintah daerah.

Rumus tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal (pemerintah pusat, provinsi, dan lainnya) semakin kecil. Sebaliknya semakin rendah tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal semakin besar.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data panel untuk 24 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2005-2019. Data yang dikumpulkan yaitu data total penerimaan pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan badan pusat statistik masing-masing kabupaten dan kota.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dalam hal ini penulis

menggambarkan perkembangan jumlah penerimaan daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir. Kemudian untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah, penulis menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah dengan rumus:

$$\text{Tingkat kemandirian keuangan} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total penerimaan daerah}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Daerah

Dalam era desentralisasi dewasa ini, penerimaan pemerintah daerah pada dasarnya meliputi: (1) pendapatan asli daerah, (2) dana perimbangan, dan (3) lain-

lain pendapatan daerah yang sah dan tidak mengikat. Hasil penelitian, diperoleh data tentang penerimaan pemerintah daerah selama tahun 2015-2019, pada 24 kabupaten dan kota yang ada, terlihat pada tabel 1.

Tabel 1
Perkembangan Penerimaan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bantaeng	683.523	982.702	944.901	1.054.251	1.077.405	11,53
2	Barru	787.984	1.013.803	850.402	973.185	976.487	4,78
3	Bone	1.671.266	2.132.118	2.130.544	2.229.427	2.369.015	8,35
4	Bulukumba	1.217.842	1.401.657	1.458.600	1.504.675	1.501.659	4,66
5	Enrekang	802.672	1.116.234	976.840	1.041.082	1.095.919	7,31
6	Gowa	1.339.474	1.622.477	1.528.331	1.769.955	1.821.848	7,20
7	Jeneponto	917.138	1.262.033	1.203.210	1.259.191	1.402.923	10,59
8	Kab. Luwu	1.019.263	1.433.184	1.273.576	1.320.668	1.463.900	8,72
9	Luwu Utara	999.688	1.186.914	1.185.156	1.292.028	1.369.922	7,41
10	Maros	1.139.552	1.362.077	1.259.001	1.420.137	1.472.441	5,84
11	Pangkajene Kepulauan	1.118.340	1.359.454	1.302.403	1.415.418	1.417.246	5,35
12	Luwu Timur	1.113.897	1.336.075	1.337.428	1.519.074	1.537.820	7,61
13	Pinrang	1.043.892	1.278.032	1.147.234	1.217.469	1.278.266	4,49
14	Sinjai	846.961	1.100.923	1.032.745	1.118.578	1.123.516	6,53

No	Kabupaten/ Kota	Tahun					Pertum- buhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
15	Kepulauan Selayar	722.529	898.009	859.090	1.060.706	1.004.377	7,80
16	Sidenreng Rappang	1.028.359	1.327.372	1.366.879	1.467.339	1.274.326	4,78
17	Soppeng	921.135	1.169.745	1.108.434	1.107.422	1.162.500	5,24
18	Takalar	908.306	1.180.936	1.028.868	1.210.696	1.173.816	5,85
19	Tana Toraja	809.148	1.101.434	1.014.304	1.160.000	1.290.000	11,89
20	Wajo	1.137.337	1.481.361	1.462.729	1.466.991	1.559.309	7,42
21	Toraja Utara	744.920	841.119	938.386	1.114.447	1.116.611	9,98
22	Palopo	741.187	1.004.763	869.050	978.377	1.008.646	7,22
23	Pare-pare	730.013	802.024	997.418	858.161	931.659	5,52
24	Makassar	3.081.368	3.659.222	3.393.899	3.898.109	4.099.953	6,61

Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan daerah kabupaten dan kota selama tahun 2015-2019 meningkat dengan kukup besar. Ada tiga kabupaten yang penerimaannya tumbuh di atas 10 persen per tahun yaitu; Kabupaten Tana Toraja 11,89 persen, Kabupaten Bantaeng 11,53 persen dan kabupaten Jeneponto 10,59 persen. Juga terdapat 4 kabupaten yang tingkat pertumbuhan penerimaannya relatif rendah yaitu, Kabupaten Pinrang 4,49 persen, Kabupaten Bulukumba 4,66 persen, Kabupaten Barru 4,78 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang 4,78 persen.

Pendapatan Asli daerah

Komponen pendapatan asli daerah untuk kabupaten dan kota meliputi, (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah meliputi; jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Adapun besarnya perkembangan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, pendapatan asli daerah kabupaten dan kota tumbuh dengan cukup tinggi. Delapan kabupaten dan kota dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah di atas 20 persen yaitu; Kabupaten Tana Toraja 34,06 persen, Kabupaten Barru 26,80 persen, Kabupaten Enrekang, 26,28 persen, Kabupaten Jeneponto 24,01, Kota Palopo 23, 83 persen, Kabupaten Bantaeng 22,9 persen, Kabupaten Maros 22,6 persen, dan Kabupaten Toraja Utara 20,81 persen. Hanya 5 kabupaten dan kota yang tumbuh di bawah 10 persen yaitu; Kota Pare-pare 6,47 persen, Kabupaten Pinrang 4,81 persen, Kabupaten Bone 7, 30 persen, Kabupaten Takalar 8, 75 persen, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan 9,57 persen.

Tabel 2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun					Pertum- buhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bantaeng	46.062	62.492	101.611	162.085	98.819	22,91
2	Barru	47.016	64.690	77.405	113.839	110.014	26,80
3	Bone	143.285	155.636	173.957	178.628	195.573	7,30
4	Bulukumba	109.700	130.350	166.357	191.061	194.291	15,42
5	Enrekang	47.211	91.794	102.781	86.576	109.257	26,28
6	Gowa	131.694	159.979	158.737	189.362	198.479	10,14
7	Jeneponto	64.000	77.551	89.765	120.905	140.833	24,01
8	Kab. Luwu	57.382	59.255	99.157	102.180	109.653	18,22
9	Luwu Utara	76.699	79.659	94.571	106.954	121.816	11,76
10	Maros	125.045	180.007	180.353	202.645	266.418	22,61
11	Pangkajene Kepulauan	125.362	154.596	160.535	175.941	185.326	9,57
12	Luwu Timur	155.503	166.867	221.541	257.394	289.641	17,25
13	Pinrang	89.801	93.793	104.546	98.987	111.413	4,81
14	Sinjai	50.702	57.697	66.375	74.960	90.403	15,66
15	Kepulauan Selayar	39.316	46.478	57.175	71.275	73.913	17,60
16	Sidenreng Rappang	92.996	126.565	122.573	163.409	140.872	10,30
17	Soppeng	58.056	59.818	80.106	90.247	106.945	16,84
18	Takalar	97.971	105.116	111.680	161.418	140.821	8,75
19	Tana Toraja	69.458	76.975	106.000	160.000	187.752	34,06
20	Wajo	82.186	111.894	128.072	138.610	155.455	17,83
21	Toraja Utara	27.549	41.384	101.615	58.563	56.220	20,81
22	Palopo	76.227	150.119	126.427	145.211	167.052	23,83
23	Pare-pare	114.782	137.515	140.345	145.208	151.921	6,47
24	Makassar	992.148	1.305.180	1.332.547	1.483.713	1.649.403	13,25

Tingkat Kemandirian Keuangan

Untuk melihat tingkat kemandirian fiskal atau keuangan suatu kabupaten atau kota, maka tentunya kita harus dapat membandingkan antara total pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, maka tingkat kemandirian daerah itu semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah rasio pendapatan asli daerah dibanding dengan pendapatan asli daerahnya, maka tingkat kemandirian daerah tersebut semakin kecil.

Selain analisis rasio pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah, cara lain yang dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan suatu daerah adalah dengan membanding dengan daerah lainnya. Suatu daerah dikatakan memiliki tingkat kemandirian tinggi apabila rasio pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah, suatu daerah lebih tinggi dibanding dengan daerah lainnya. Sebaliknya apabila rasio kemandirian keuangan suatu daerah lebih rendah dibanding dengan daerah lainnya, maka

kita dapat mengatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut rendah. Adapun rasio kemandirian keuangan daerah tingkat II di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Perkembangan Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 (dalam persen)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bantaeng	6,74	6,36	10,75	15,37	9,17	9,68
2	Barru	5,97	6,38	9,10	11,70	11,27	8,88
3	Bone	8,57	7,30	8,16	8,01	8,26	8,06
4	Bulukumba	9,01	9,30	11,41	12,70	12,94	11,07
5	Enrekang	5,88	8,22	10,52	8,32	9,97	8,58
6	Gowa	9,83	9,86	10,39	10,70	10,89	10,33
7	Jeneponto	6,98	6,14	7,46	9,60	10,04	8,04
8	Kab. Luwu	5,63	4,13	7,79	7,74	7,49	6,56
9	Luwu Utara	7,67	6,71	7,98	8,28	8,89	7,91
10	Maros	10,97	13,22	14,33	14,27	18,09	14,18
11	Pangkajene Kepulauan	11,21	11,37	12,33	12,43	13,08	12,08
12	Luwu Timur	13,96	12,49	16,56	16,94	18,83	15,76
13	Pinrang	8,60	7,34	9,11	8,13	8,72	8,38
14	Sinjai	5,99	5,24	6,43	6,70	8,05	6,48
15	Kepulauan Selayar	5,44	5,18	6,66	6,72	7,36	6,27
16	Sidenreng Rappang	9,04	9,54	8,97	11,14	11,05	9,95
17	Soppeng	6,30	5,11	7,23	8,15	9,20	7,20
18	Takalar	10,79	8,90	10,85	13,33	12,00	11,17
19	Tana Toraja	8,58	6,99	10,45	13,79	14,55	10,87
20	Wajo	7,23	7,55	8,76	9,45	9,97	8,59
21	Toraja Utara	3,70	4,92	10,83	5,25	5,03	5,95
22	Palopo	10,28	14,94	14,55	14,84	16,56	14,24
23	Pare-pare	15,72	17,15	14,07	16,92	16,31	16,03
24	Makassar	32,20	35,67	39,26	38,06	40,23	37,08
Rata-rata		9,43	9,58	11,41	12,02	12,41	10,97

Apabila mengacu pada rasio rata-rata daerah ini, sangat wajar, mengingat tiga penerimaan daerah tingkat pada tahun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan 2018 yaitu 15,50 persen, (Direktorat relatif maju dibanding daerah kabupaten Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018), yang ada, kecuali Kabupaten Luwu Timur. Dapat dikatakan bahwa hanya terdapat 4 Dimana Kabupaten Luwu Timur adalah kabupaten kota yang berada di atas rata-rata daerah tambang, terdapat PT. Vale yang rata nasional yaitu, Kota Makassar 40,23 merupakan perusahaan pertambangan yang persen, Kabupaten Luwu Timur 18,83 cukup besar, sehingga tentunya persen, Kota palopo 16,56 persen, dan memberikan kontribusi besar terhadap Kota Pare-pare sebesar 16,31 persen. peningkatan penerimaan atas pendapatan Tingginya kemandirian fiskal keempat asli daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil penelitian diperoleh bahwa kemandirian keuangan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan relatif kecil. Dikatakan demikian karena rasio kemandirian keuangan dalam hal ini rasio pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah relatif kecil yaitu hanya rata-rata 10,97 persen dalam lima tahun terakhir. Apabila kita bandingkan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan seluruh daerah tingkat II di Indonesia pada tahun 2018, kita juga dapat mengatakan bahwa kemandirian keuangan daerah tingkat II yang ada Provinsi Sulawesi Selatan relatif kecil, karena pada tahun 2018 rasio kemandirian daerah tingkat II seluruh Indonesia adalah 15,50 persen, sementara rasio kemandirian keuangan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata hanya 12,02 persen. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan relatif besar terhadap sumber dana dari pemerintah pusat.

Rekomendasi

Dalam upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan keuangan pada

pemerintah pusat, sekaligus untuk meningkatkan kemandirian keuangan, maka pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, perlu berusaha menggali potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dalam bentuk pajak daerah, retribusi daerah, maupun dalam bentuk keuntungan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran sehingga tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi, sehingga kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, yang sekaligus meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, N.A. Achsani, M. Tambunan, S.A. Mulyo. (2012). Impact of Fiscal Policy on the Agricultural Development in an Emerging Economy: Case Study from the South Sulawesi, Indonesia. *International Research Journal of Finance and Economics*. 96:101-112., 96, 101-112.
- Akhmad. (2015). Dampak Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Pada Sepuluh Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Prosiding Seminar Nasional 2015 Lembaga Penelitian*

- UNM (hal. 32-46). Makassar: Lembaga Penelitian UNM.
- Akhmad. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Bogor: Azkiya Publishing.
- Alm, J., R.H. Aten, and R. Bahl. . (2001). Can Indonesia Decentralise Successfully? Plans, Problems and Prospects. *Buletin of Indonesian Economic Studies*, 37(1), 83-102.
- Cullis, J.G. and P.R. Jones. (1992). *Public Finance and Public Choice*. Singapore.: McGrow Hill.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2009). *Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Sektor Rill*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). *Ringkasan APBD 2018*. Jakarta: Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.
- Direktorat Otonomi Daerah. (2010). *Kajian Pemetaan dan Evaluasi Efektivitas Regulasi Sektoral dan Desentralisasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Halim A and T. Damayanti . (2011). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Halim A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iimi A. (2005). Decentralization and Economic Growth Revisited: An Empirical Note. *Journal of Urban Economics*, 57(1), 449-461.
- Kamaroellah R.A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Nuansa*, 14(1), 123-136.
- Indah. (2014). Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 9(2), 137-153.
- Lin, J.Y. and Z. Liu. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China . *Economic Development and Cultural Change*, 49(1), 1-21.
- Nurhemi and G.Suryani. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(2), 183-206.
- Poque T.F. and L.G.Sgontz. (1978). *Government and Aconomic Choice: An Introduction to Public Finance*. Houghton Mifflin Company, Boston. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Samimi A.J A.J., S.K.P.Lar, G.K.Haddad, and M. Alizadeh, (2010). Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 4(11), 5490-5495.
- Saragih J.P. (2014). Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi. *Politica*, 5(2), 200-224.

- Simanjuntak, R. (2002). *Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Optimasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Working Paper. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta.*, (hal. 71-88). Jakarta.
- Subiyantoro, H. dan S. Rifat. (2004). *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi.* Kompas, Jakarta. *Kompas* (hal. 55-65). Jakarta.: Kompas.
- Suci S.C dan A.Asmara. (2014). *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten.* *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 8-22.
- Susiyati, B.H. (2007). *Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi.* Jakarta: Universitas Indonesia.
- Syahputra R. (2017). *Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang.* *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 12-21.